

Faktor-Faktor Determinan yang Berpengaruh Pada Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2000-2016

Denis Setiawan¹, Muchtar², Humaidah Muafiqie³

^{1,2,3}Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang
denis.setiawan@gmail.com¹, muchtar.210959@gmail.com², fiqie63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan determinan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Data yang dipakai dalam analisis pengujian menggunakan data tahunan periode 2000-2016. Teknik pembuktian menggunakan analisis ekonometrika *Autovector Regression* (VAR). Hasil pengujian dengan analisis VAR menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh inflasi pada 1 tahun periode sebelumnya, arus modal asing pada *lag* periode tahun pertama dan kedua, GDP pada tahun kedua, jumlah penduduk pada baik tahun pertama dan kedua, dan upah untuk tahun pertama dan kedua. Uji kasualitas dengan kasualitas *Granger* disimpulkan bahwa antara tingkat pengangguran dengan tingkat upah (WGE) bersifat dinamis (timbang balik), sementara antara GDP dengan UE, UE dengan POP, UE dengan GDP, bersifat searah. Simpulan uji *Granger* pada INF dengan UE atau sebaliknya tidak terbukti signifikan.

Kata kunci: Tingkat pengangguran, UMR, GDP, FDI, Populasi, Inflasi.

ABSTRACT

This study aims to prove determinant that has an influence on the unemployment rate in Indonesia. The data used in the analysis testing using annual data from 2000 to 2016 period. Verification techniques using econometric analysis Autovector Regression (VAR). The test results with analysis of VAR show that the unemployment rate in Indonesia are influenced by inflation in the first years of the previous period, the flow of foreign capital in the lag period of first and second year, GDP in the second year, the number of people on both first and second year, and wages for the year the first and second. Test Granger causality test concluded that the rate of unemployment to wage levels (WGE) is dynamic (reciprocal), while the GDP in the EU, the EU with POP, EU GDP, are unidirectional. Conclusions Granger test on INF with the EU or otherwise not proved significant.

Keywords: unemployment rate, minimum wage, GDP, FDI, Population, Inflation.

I. PENDAHULUAN

Pengangguran (*unemployment*) merupakan salah satu variabel utama yang menjadi fokus dari pembangunan. Tingkat pengangguran mempunyai pola hubungan linier dengan angka kemiskinan, yang berarti terjadinya peningkatan angka pengangguran pada angkatan kerja akan diikuti peningkatan jumlah warga miskin di suatu wilayah. Bahkan merujuk pada UUD tahun 1945 pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, hal ini mencerminkan bahwa persoalan pengangguran merupakan permasalahan mendasar dalam sejarah pendirian negara Indonesia dan terkait dengan konsepsi tujuan dasar pembangunan berkelanjutan yang salah satu pilarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya (Ridho, 2010).

Teori Keynes membedakan pengangguran dalam tiga bentuk: pertama, pengangguran sebagai tipe siklikal atau pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan permintaan dari aspek fenomena makro ekonomi. Tipe ini mencerminkan terjadinya ketidakcukupan fiskal atau permintaan moneter di ekonomi untuk memperkerjakan angkatan kerja sehingga dapat mencapai nol pengangguran. Secara umum para ekonom menganggap pengangguran ini sebagai sesuatu yang dikehendaki karena terbentuk dan ditentukan oleh pendapatan individual, keuntungan perusahaan, maupun tingkat GNP negara tersebut. Sementara itu tipe ketiga, pengangguran dianggap sebagai fenomena struktural dimana terjadi kesenjangan antara jumlah lowongan pekerjaan tersedia dengan para pencari kerja. Faktor geografis, sejarah maupun diskriminasi terkait suku, jenis kelamin, maupun usia adalah faktor yang diketahui sebagai penyebab masalah struktural ini (Jensen, 1989).

Selain berdampak pada kemiskinan, pengangguran juga mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Persoalan sosial seperti kejahatan, gangguan keamanan, dan perilaku negatif individu juga dapat dikaitkan dengan pengangguran (Eita & Ashipala, 2010). Secara empiris dampak pengangguran terhadap individu akan memunculkan persoalan dalam bentuk sikap personal seseorang seperti tingkat keramahan (*agreeableness*), kesadaran (*conscientiousness*) dan keterbukaan (*openness*) (Boyce et al., 2015). Pengangguran juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan perilaku konsumsi alkohol yang memicu kekerasan maupun tingkat kejahatan (Raphael & Winter, 2001). Ini menunjukkan bahwa penanggulangan program penanggulangan pengangguran juga akan memberikan dampak positif pada ketertiban dan keamanan di ranah kehidupan sosial.

Kajian terhadap literature menunjukkan bahwa determinan pengangguran dapat ditinjau dari berbagai aspek penyebab. Secara umum dapat di dekati dari pendekatan makro ekonomi dan mikro ekonomi. Pada perspektif kebijakan makro faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan pendapatan nasional (GDP), inflasi, investasi di sektor swasta (PDI), tingkat keterbukaan ekonomi (Oniore et al., 2015), Permintaan tenaga kerja, Penawaran Tenaga Kerja, Pertumbuhan populasi, Status Pendidikan, (Eita & Ashipala, 2010), tingkat upah minimum (Dickens et al., 1999); (Medeline, 2000), *output gap*, ketidakstabilan ekonomi, *Gross Fixed Investment (GFI)*, Produktivitas Nasional, dan keterbukaan perdagangan (Cheema & Atta, 2014). Kajian dan penelitian tentang pengangguran di Indonesia juga dilakukan oleh Trimurti & Komalasari (2014) dengan menggunakan tiga prediktor terhadap tingkat pengangguran, yaitu: Tingkat pendapatan domestik regional (GDRP), tingkat inflasi, dan besaran upah minimum. Pengujian yang dilakukan memberikan bukti signifikan pengaruh antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran, sementara pada GDRP dan upah minimum hanya di dapatkan bukti hubungan negatif pada upah minum dan positif pada GDRP namun tidak cukup bermakna. Darma dan Arsyad (2010) dengan pendekatan kualitatif melakukan studi kasus terhadap tingkat pengangguran di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, menemukan bahwa salah satu determinan pengangguran adalah keinginan untuk memilih pekerjaan pada sektor formal meskipun penawaran terhadap upah yang di janjikan pada sektor swasta maupun wiraswata lebih tinggi dari sektor formal. Selain itu tingkat pengangguran juga cenderung meningkat disebabkan sistem kerja kontrak yang diberlakukan oleh perusahaan pencari kerja, walaupun demikian program pengembangan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ini berarti bahwa peran pemerintah di tingkat mikro juga berperan besar dalam kaitannya jumlah pengangguran yang ada.

Di Indonesia, secara statistik tingkat pengangguran menunjukkan kecenderungan yang menurun.

Di antara negara-negara dunia, kinerja penanggulangan pengangguran menunjukkan berada pada kinerja yang baik, hal ini mengacu pada data yang di rilis oleh biro pusat statistik Indonesia. Dengan tingkat pengangguran sebesar 5,9%, tingkat pengangguran Indonesia berada pada peringkat 16 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan negara besar seperti Perancis (10,2%), Belanda (7,4%), Amerika Serikat (6,2%), Inggris (6,2%) maupun Australia (6,1%). Namun demikian, bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, tingkat pengangguran di Indonesia masih jauh lebih tinggi dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (2%), Thailand (0,8%), Malaysia (2,9%) dan Vietnam (2,5%) (bps.co.id).

Kemampuan Indonesia untuk pulih dari krisis juga berdampak pada laju penurunan tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa selama 2004 hingga 2014 rata-rata pengangguran mempunyai laju penurunan mencapai 5%. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 11,2% sementara tingkat pengangguran terendah dicapai pada tahun 2014 yang mencapai 5,9% atau telah turun sebanyak 47% sejak menyentuh angka pengangguran tertinggi pada tahun 2005.

Meskipun secara statistik terdapat progresivitas penanggulangan pengangguran di Indonesia, problematika pengangguran tetap harus menjadi fokus dalam setiap kebijakannya. Pemerintah harus terus menjaga ekonomi secara stabil dan tidak bergejolak. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Resesi ekonomi juga diketahui berdampak pada pengangguran yang signifikan (Katz, 2010). Oleh sebab itu identifikasi terhadap determinan penentu kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran sangat penting. Hal ini penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan pengangguran baik dalam strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan juga akan dapat bermanfaat untuk melakukan pemilihan ekonomi ketika terjadi krisis agar meningkatkan penyerapan pengangguran.

Dharma dan Arsyad (2010) menyebutkan bahwa jenis pengangguran di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek: pertama dari perspektif gender, masih terjadi kesenjangan antara pengangguran pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Rata-rata pengangguran perempuan (13%) jauh lebih tinggi dari laki-laki (7,6%). Kedua, pengangguran menurut tingkat pendidikan, bahwa tingkat pendidikan lebih tinggi seperti universitas (9,1%) jauh lebih rendah dengan masyarakat dengan pendidikan lebih rendah seperti SMA (16,9%). Ketiga, menurut usia bahwa pengangguran terbesar pada kelompok usia 15-19 tahun (36,7%). Persoalan ini tidak hanya pada tingkat nasional, namun pada tingkat lokal yang mempunyai kecenderungan sama di berbagai wilayah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Temuan Trimurti dan Komalasari (2014) menunjukkan bahwa identifikasi terhadap determinan makro ekonomi saja tidak cukup. Studi yang dilakukan terhadap 7 wilayah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali yang mempunyai ekonomi lebih stabil dibandingkan yang lain namun tidak cukup mampu untuk menekan angka pengangguran. Rata-rata pertumbuhan 7 wilayah tersebut mencapai 6% per tahunnya namun kenaikan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan hanya tumbuh kurang dari 1 persen per tahun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ada banyak literature yang mengungkapkan determinan pengangguran baik dari aspek mikro maupun makro. Namun demikian, dalam penelitian ini diuraikan beberapa determinan faktor pengangguran berdasarkan perspektif makro, di dasarkan teori dan hasil bukti empiris dari penelitian yang telah ada.

Pendapatan Nasional (GDP)

Secara teoritis maupun empiris para ahli sepakat bahwa GDP merupakan faktor penting terhadap tingkat pengangguran. Beberapa penelitian yang diacu memasukkan GDP sebagai salah satu faktor prediktor terhadap tingkat pengangguran (Trimurti & Komalasari, 2014; Eita & Ashipala, 2010; Maqbool et al., 2013; Sabir & Naz, 2015). Walaupun mayoritas temuan yang ada menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara GDP dengan tingkat pengangguran, namun beberapa penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda seperti Sabir & Naz (2015) yang menyajikan bukti bahwa GDP tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran.

Gross Domestic Product (GDP) diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw, 2006:5).

GDP (Y) diformulasikan sebagai persamaan atas empat komponen yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja negara (G), dan ekspor neto (NX) yang dapat dinyatakan dalam persamaan: $Y = C + I + G + NX$

Persamaan ini merupakan persamaan identitas – sebuah persamaan yang pasti benar dilihat dari bagaimana variabel - variabel persamaan tersebut dijabarkan. Komponen tersebut ialah 1) Konsumsi (*consumption*) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. 2) Investasi (*investment*) adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa 3). Belanja pemerintah (*government purchases*) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat (federal). 4) Ekspor neto (*net exports*) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (import) (Mankiw, 2006: 11).

Teori ekonomi klasik telah menjelaskan kaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk dan sering disebut sebagai teori penduduk optimum. Apabila kekurangan penduduk maka produksi marjinal akan lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, akibatnya penambahan penduduk dapat menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, jumlah penduduk sudah terlalu banyak maka hasil tambahan akan semakin berkurang sehingga mempengaruhi fungsi produksi, Akibatnya produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Anggoro & Soesatyo, 2015). Teori hokum Okun menyatakan bahwa setiap penurunan dua persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar satu persen (Samuelson dan Nordhaus, 2004: 365)

Inflasi

Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi suatu masyarakat. Gejala ekonomi umumnya akan ditandai dengan kenaikan inflasi yang menyebabkan harga-harga barang meningkat. Sukirno (2006:328) menjelaskan bahwa pengangguran dan inflasi adalah masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat yang bersifat ekonomik, politik dan sosial. Upaya untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran.

Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat dan derajat keparahan kejadian kenaikan harga antara lain: a) Inflasi moderat (*Moderat Inflation*), yaitu ditandai naiknya harga secara lambat dan dapat diramalkan. Kita dapat menyebutnya sebagai laju inflasi satu pertahun, karena apabila barang-barang relatif stabil masyarakat percaya pada uang. b) Inflasi Ganas (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi dalam dua digit atau tiga digit seperti 20, 100, atau 200 persen pertahun. Inflasi ganas timbul, maka timbul juga gangguan yang serius terhadap perekonomian. c) Hiperinflasi, yaitu ketika ekonomi mengalami inflasi yang sangat parah (Samuelson dan Nordhaus, 2005:312)

Salah satu model yang digunakan menunjukkan hubungan antara besaran tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran adalah kurva Phillips. Kurva ini menyatakan terdapat *trade off* antara inflasi dengan pengangguran, yakni apabila tingkat inflasi tinggi maka pengangguran rendah. Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik (Samuelson dan Nordhaus, 2004: 381). Kurva Phillips menjelaskan bagaimana uang yang tidak netral dan selalu menjadi bagian sentral dari cara berpikir ekonom tentang ekonomi makro dan kebijakan moneter serta membentuk dasar pemahaman populer secara implisit dari masalah dasar kebijakan ekonomi, yaitu, keinginan ekonomi yang tumbuh sehingga pengangguran rendah (Lacker & Weinberg, 2007).

Populasi Penduduk

Pandangan ahli – ahli ekonomi klasik ada menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang – barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik lebih menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisahan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan (Anggoro & Soesatyo, 2015).

Kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsistem. Masalah kependudukan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan antara lain adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang (Arsyad, 2010).

Flaim (1990) menyatakan simpulannya tentang kaitan antara perubahan populasi penduduk dengan tingkat pengangguran bahwa dalam jangka panjang, perubahan struktur umur penduduk dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai indikator kesehatan pasar tenaga kerja. Pada tiga dekade terakhir, misalnya, jalannya tingkat pengangguran secara bertahap telah diubah oleh perubahan populasi.

Upah Minimum

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat. Tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu upah nominal dan upah riil. Upah Nominal (upah uang) merupakan jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sukirno, 2006)

Menurut Ricardo (dalam Mankiw, 2006) bahwa di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar dimana upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan. Kaufman (2000) menjelaskan bahwa tujuan utama dari ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar minimum hidup seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja.

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan seberapa nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan pengusaha adalah $W = WMPL$ atau $MPPL \times P$ dimana W adalah tingkat upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja, P merupakan harga jual barang, $MPPL$ merupakan *marginal physical product of labor* sementara $WMPL$ adalah *value of marginal physical product of labor*. Dengan demikian dalam teori neo klasik upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang berikan seseorang tersebut kepada pemberi kerja.

Investasi Modal Asing (*Foreign Direct Investment*)

Foreign Direct Investment (FDI) dapat diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu

ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. *Foreign Direct Investment* (FDI) dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya capital outflow sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan menimbulkan kerentanan ekonomi.

Aliran FDI memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (1) Aliran modal tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi; (2) Integrasi global pasar modal dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan *corporate governance, accounting rules*, dan legalitas; dan (3) Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah (Feldstein, 2000).

FDI bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya. Negara penerima (*host country*) FDI akan menerima keuntungan antara lain adanya dalih teknologi dalam bentuk varietas baru dari capital inputs yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan (*financial investment*) atau perdagangan barang dan jasa. FDI juga dapat mempromosikan kompetisi pada pasar domestik dan penerimanya akan memberikan pelatihan bagi karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di *host country*.

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki dampak positif bagi suatu negara antara lain adalah terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terbangunnya skill dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, terbangunnya semangat kewirausahaan pada pengusaha lokal dapat lebih meningkatkan penghasilan yang cukup dan layak, pengusaha lokal lebih terpacu untuk berpartisipasi bersama dengan asing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermutu, negara dapat memperoleh pemasukan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari beragam aktivitas kegiatan usaha, sehingga pada gilirannya kualitas hidup seluruh masyarakat dapat meningkat.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan, penelitian ini masuk dalam kategori *testing hypothesis* karena penelitian dengan desain *testing hypothesis* menjelaskan hubungan-hubungan tertentu atau perbedaan-perbedaan antar kelompok atau independensi dari dua faktor atau lebih dalam satu situasi (Asep, 2006:83). Sementara itu, berdasarkan jenis hubungan antara variabel, penelitian ini masuk dalam hubungan kausal dari variabel yang menyebabkan pengangguran, sedangkan dilihat dari unit analisis yang dilakukan, maka penelitian ini menggunakan unit analisis kelompok (Asep, 2006:88). Penelitian ini menggunakan metodologi riset *explanatory* (riset kuantitatif), yang memiliki tujuan dalam pengujian hipotesis untuk mengembangkan suatu teori. Penelitian kuantitatif ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk mendapat suatu keluaran berupa informasi ilmiah, mengenai interpretasi dari angka-angka tersebut (Cooper, 2011). Beberapa batasan digunakan untuk memperjelas cakupan penelitian ini. Beberapa batasan tersebut antara lain:

1. Determinan pengangguran dalam penelitian ini dibatasi dalam perspektif makro ekonomi, dengan demikian fokus penelitian mengabaikan asumsi-asumsi mikro.
2. Ruang lingkup data yang dikaji adalah antara data tahun 2004 sampai dengan 2015 dengan menggunakan data tahunan sebagai basis analisis.
3. Data yang dianalisis adalah data pada tingkat nasional.

Variabel Pengangguran (UE) didefinisikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. (Sukirno, 2004:327). Data diukur dari rasio antara tingkat orang menganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS). Data dinyatakan dalam persentase.

Pendapatan nasional (GDP) diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2005). Dengan demikian

pendapatan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan secara nasional di Indonesia. Pendapatan nasional diukur dengan tingkat pendapatan bruto nasional (GDP) yang di rilis oleh Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan dinyatakan dalam Log Natural Jumlah GDP (Ln GDP).

Inflasi (INF) diartikan kenaikan harga-harga yang umum secara terus menerus dalam periode waktu tertentu pada suatu daerah yang dihitung berdasarkan *year on year* (YOY). Data inflasi dinyatakan dalam persentase dan di dapatkan dari rilis baik Bank Indonesia (BI) ataupun Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS).

Populasi Penduduk (POP) di definisikan sebagai jumlah orang yang mendiami wilayah tertentu dan tumbuh berkembang dalam wilayah tersebut. Pada penelitian jumlah penduduk berarti merujuk jumlah penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia di ambil dari rilis Biro Pusat Statistik yang dinyatakan dalam jumlah. Selanjutnya data populasi dalam penelitian ini akan disajikan dalam Log Natural (LN) untuk dianalisis.

Upah Minimum (WGE), diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Upah uang yaitu jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno, 2006). Dengan demikian Upah Minimum adalah batasan dasar nilai upah terendah yang ditentukan pemerintah sebagai standar pengupahan dalam suatu wilayah. Dalam penelitian ini data diukur dari jumlah Standar Upah Minimum rata-rata untuk tingkat nasional dan diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS). Data dinyatakan dalam nilai Log Natural.

Investasi modal asing (FDI) diartikan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan asing di Indonesia. Dalam penelitian data arus modal asing diukur dengan jumlah modal investasi asing yang masuk ke Indonesia dalam periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan Moneter, yang selanjutnya di normalisasi dengan nilai Log Natural. Data di peroleh dari rilis Biro Pusat Statistik (BPS).

Analisis yang digunakan untuk menjelaskan determinan yang signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia dalam penelitian ini digunakan metode analisis *Vector Autoregressive (VAR)*. VAR merupakan regresi sederhana dari persamaan $X_t = \Gamma X_{t-1} + \epsilon_t$ dimana X_t = vektor dari *time series* yang stationer dan ϵ_t = vektor pada *time series* yang *white noise* dengan matriks kovarian Ω .

Analisis VAR merupakan model ekonometrika yang sering digunakan dalam analisis kebijakan makroekonomi dinamik dan stokastik. VAR merupakan suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai *lag* (lampau) dari variabel itu sendiri, serta nilai *lag* dari variabel lain yang ada dalam sistem. Variabel penjelas dalam VAR meliputi nilai *lag* seluruh variabel tak bebas dalam sistem VAR yang membutuhkan identifikasi retriaksi untuk mencapai persamaan melalui interpretasi persamaan (Ajija, et al., 2011:165).

IV. HASIL PENELITIAN

Uji Stasioner

Hasil pengujian di dapatkan nilai t statistik variabel UE pada data *level* sebesar -0,302 dengan p-value 0,560 dengan demikian H₀ diterima artinya data belum stasioner pada data *level*. Pengujian dilanjutkan pada data *first difference* (D(UE)) di dapatkan nilai t statistik sebesar -3,17 dengan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,0038 sehingga H₀ ditolak. Dengan demikian uji akar unit pada variabel UE stasioner pada data *first difference*.

Pengujian pada variabel lainnya di antara lain di dapatkan bahwa variabel LnGDP stasioner pada *second difference* dengan t statistik sebesar -2,96 dan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,0062. Uji pada variabel INF menunjukkan bahwa variabel inflasi stasioner pada data *level* dengan nilai t statistik sebesar -3,42 dan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,025. Uji pada variabel LnPOP di simpulkan bahwa variabel jumlah penduduk stasioner pada *first difference* dengan t statistik sebesar -9,69 dan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,000. Uji selanjutnya pada variabel LnWGE dan LnFDI menyimpulkan bahwa dua variabel tersebut stasioner pada data *first difference* dengan nilai t statistik untuk LnWGE sebesar -3,37 dan p-value 0,029 sementara LnFDI dengan t statistik sebesar -4,363 dan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,047. Penggunaan analisis VAR mensyaratkan data stasioner pada

data *level*, jika menggunakan analisis pada data level semua, atau salah satu variabel stasioner pada level sementara yang lain pada *difference* ketika memakai VAR dengan data *difference*.

Kriteria Maksimum Lag

Uji *likelihood ratio* digunakan untuk melihat kriteria jumlah lag yang paling sesuai untuk suatu model. Uji ini seharusnya dilakukan terhadap semua jumlah lag yang mungkin sesuai untuk model yang diamati. Kriteria pemilihan lag yang sesuai dapat dilakukan menggunakan statistik FPE, AIC, SC, maupun HQ. Model yang baik adalah model yang mampu memberikan tingkat residual (*error*) yang paling kecil. Dalam penelitian ini ditemukan lag = 2 merupakan lag model VAR yang sesuai berdasarkan seluruh kriteria yang ada.

Analisa Granger Causality

1. Hubungan Dinamis Tingkat Pengangguran (UE) dengan Inflasi (INF)

Hasil uji Granger Causality menunjukkan nilai F Statistik untuk Pengaruh UE terhadap inflasi menunjukkan nilai 2,697 dengan probabilitas menerima H₀ (Hipotesis Null) sebesar 0,1245 atau 12,45%. Pada batas toleransi penerimaan alpha 5%, maka H₀ diterima karena nilai probabilitas menerima H₀ sangat besar (diatas 5%), dengan demikian tidak terbukti bahwa tingkat pengangguran menjadi penyebab terjadinya inflasi di Indonesia.

Begitu juga sebaliknya kemampuan Inflasi (INF) dalam mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia juga tidak terbukti. Nilai F statistik menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu 0,668 dengan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,428 (42,8%) sangat besar sehingga H₀ diterima. Ini berarti Inflasi tidak menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan pengangguran di Indonesia.

2. Hubungan Dinamis Tingkat Pengangguran (UE) dengan Foreign Direct Investment (LnFDI)

Hasil analisa Granger Causality menunjukkan bahwa FDI di Indonesia tidak ditentukan oleh faktor besar kecilnya tingkat pengangguran di Indonesia. Uji Granger Causality menunjukkan hasil nilai F statistik yang sangat kecil (0,647) dengan probabilitas menerima H₀ sangat besar (0,435) dengan demikian dapat diputuskan secara statistik bahwa UE bukan penyebab naik turunnya arus modal asing ke Indonesia.

Berbeda dengan hasil uji penerah dari UE terhadap LnFDI, pengaruh FDI tampak nyata pada terjadinya tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil Uji Granger Causality di dapatkan nilai F statistik sebesar 5,814 dengan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,0314 (dibawah 5%), dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat bukti meyakinkan, adanya arus modal asing berpengaruh penting pada besar kecilnya tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara FDI dan UE bersifat searah dan tidak timbal balik (dinamis).

3. Hubungan Dinamis Tingkat Pengangguran (UE) dengan Produk Domestik Bruto (GDP)

Hasil analisa Granger Causality menunjukkan bahwa GDP di Indonesia ditentukan oleh faktor besar kecilnya tingkat pengangguran. Uji Granger Causality menunjukkan hasil nilai F statistik yang sangat besar (54,71) dengan probabilitas menerima H₀ sangat kecil (0,000) dengan demikian dapat diputuskan secara statistik bahwa UE menjadi penentu utama besar kecilnya tingkat GDP di Indonesia.

Berbeda dengan hasil uji penerah dari UE terhadap LnGDP, pengaruh kausalitas GDP tidak menjadi penentu utama terjadinya pengangguran di Indonesia. Hasil Uji Granger Causality di dapatkan nilai F statistik sebesar 0,000 dengan probabilitas menerima H₀ sebesar 0,987 (diatas 5%), dengan demikian dapat diputuskan bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan, adanya pengaruh kausalitas GDP terhadap tingkat pengangguran. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara GDP dan UE bersifat searah dan tidak kausalitas timbal balik (dinamis).

4. Hubungan Dinamis Tingkat Pengangguran (UE) dengan Jumlah Penduduk (LnPOP)

Uji Kausalitas Granger pada pengaruh yang disebabkan oleh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk dapat disimpulkan punya kebermaknaan yang tinggi. Nilai F statistik hubungan

dalam arah ini menunjukkan angka yang sangat tinggi sebesar 42,23 dengan probabilitas menerima H_0 sangat kecil yaitu 0,000. Ini berarti bahwa terjadinya peningkatan atau penurunan pengangguran mempengaruhi laju pertumbuhan atau pengurangan penduduk di Indonesia.

Berbeda dengan hasil uji pengarah dari UE terhadap LnPOP, pengaruh kausalitas POP tidak menjadi penentu utama terjadinya pengangguran di Indonesia. Hasil Uji Granger Causality di dapatkan nilai F statistik sebesar 1,586 dengan probabilitas menerima H_0 sebesar 0,23 (diatas 5%), dengan demikian dapat diputuskan bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan, adanya pengaruh kausalitas populasi pendudu terhadap tingkat pengangguran. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara POP dan UE bersifat searah dan tidak tidak kausalitas timbal balik (dinamis).

5. Hubungan Dinamis Tingkat Pengangguran (UE) dengan Tingkat Upah Minimum Regional (LnWGE).

Uji kausalitas Granger menunjukkan adanya pengaruh antara tingkat pengangguran dengan besaran Upah Minimum Regional (WGE). Uji Granger di dapatkan nilai F statistik sebesar 36,36 dengan probabilitas menerima H_0 sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak. Ini berarti besar kecilnya upah minimum regional di Indonesia mempunyai dampak terhadap perubahan angka pengangguran di Indonesia.

Hasil uji antara hubungan kausalitas upah terhadap tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh yang nyata. Nilai F statistik menunjukkan hasil 13,258 dengan probabilitas 0,003 dengan demikian H_0 ditolak. Besaran Upah Minimum Regional menjadi faktor determinan penting terhadap besar kecilnya pengangguran di Indonesia. Hubungan kedua variabel sebagaimana disajikan dalam tabel diatas, menunjukkan adanya hubungan dinamis yang bersifat bolak balik. Ini berarti UE dapat menjadi sebab terjadinya naik turunnya WGE, maupun sebaliknya.

Analisis VAR

Model Persamaan VAR untuk Variabel Terikat
Tingkat Pengangguran (UE)

Prediktor	b	SE	t
D(UE(-1))	-1.668	-0.452	-3.692
D(UE(-2))	-0.661	-0.319	-2.074
INF(-1)	0.158	-0.065	2.420
INF(-2)	0.028	-0.090	0.314
D(LN_FDI(-1))	-3.542	-0.675	-5.249
D(LN_FDI(-2))	0.669	-0.214	3.129
D(LN_GDP(-1))	-2.618	-4.536	-0.577
D(LN_GDP(-2))	-16.282	-5.798	-2.808
D(LN_POP(-1))	-109.104	-34.471	-3.165
D(LN_POP(-2))	-53.446	-15.253	-3.503
D(LN_WGE(-1))	-15.921	-6.562	-2.426
D(LN_WGE(-2))	11.140	-2.112	5.273
C	3.560	-1.141	3.121
R-squared	0.995		

Adj. R-squared	0.933
Sum sq. Resids	0.022
S.E. equation	0.149
F-statistic	16.180

Ket: Nilai t statistik tebal menunjukkan pengaruh signifikan karena lebih besar dari t kritis 1,96

Berdasarkan hasil analisis model VAR sebagaimana disajikan dalam tabel diatas, maka model persamaan penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$D(UE) = -1.667*D(UE(-1)) - 0.660*D(UE(-2)) + 0.1580*INF(-1) + -3.541*D(LN_FDI(-1)) + 0.669*D(LN_FDI(-2)) - 16.281*D(LN_GDP(-2)) - 109.104*D(LN_POP(-1)) - 53.446*D(LN_POP(-2)) - 15.920*D(LN_WGE(-1)) + 11.139*D(LN_WGE(-2)) + 3.559$$

Model diatas menjelaskan bahwa kenaikan tingkat pengangguran 1 tahun akan berimplikasi pada menurunkan tingkat pengangguran saat ini sebesar 1,667 begitu sebaliknya, sementara untuk periode dua tahun lalu akan berdampak pada pengangguran saat ini sebesar 0,666 dengan *slope* negatif. Sebaliknya pengaruh kenaikan inflasi pada satu tahun yang lalu akan mendorong kenaikan pengangguran saat ini sebesar 0,158 begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan inflasi maka dampak pada tingkat pengangguran adalah penurunan dengan nilai perubahan sebesar nilai koefisien tersebut.

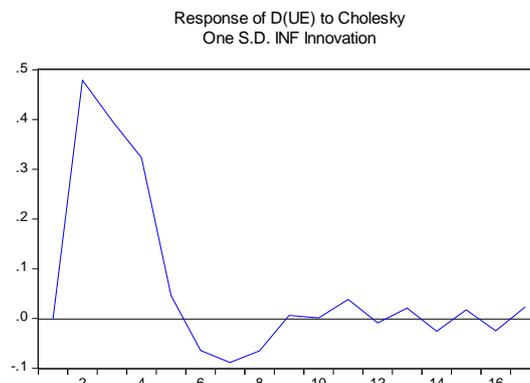
Pengaruh FDI terhadap pengangguran juga berjalan selama dua periode, yaitu satu tahun sebelumnya dan dua tahun sebelumnya. Kenaikan arus modal asing pada satu tahun lalu, akan berdampak pada kontribusi penurunan tingkat pengangguran sebesar 3,541 sementara jika arus FDI telah berjalan dua tahun dampak yang ditimbulkannya bersifat searah.

Varaibel GDP, POP dan WGE menunjukkan pola pengaruh negtif yang berarti setiap kenaikannya pada variabel tersebut memberikan dampak pengurangan pada angka persentase pengangguran, begitu juga sebaliknya penurunan variabel tersebut akan memberikan pengaruh sebaliknya. Besarnya koefisien GDP (untuk 2 tahun sebelumnya) mencapai 16,281, sementara POP untuk 1 tahun sebelumnya mencapai 109,104, dan tahun kedua sebesar 53,446. Pengaruh upah berbeda untuk tahun pertama sebelumnya dengan tahun kedua, pada tahun pertama menunjukkan arah negatif dengan koefisien 15,90 dan untuk tahun kedua sebesar 11,139.

Model diatas yang terdiri 4 prediktorkor (INF, GDP, FDI, POP dan WGE) dengan panjang *lag* 1 hingga 2 tahun mampu menjelaskan perubahan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 93,3% dengan uji kecocokkan model berdasarkan F statistik sebesar 16,180 yang berarti model merupakan prodikorkor tepat terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

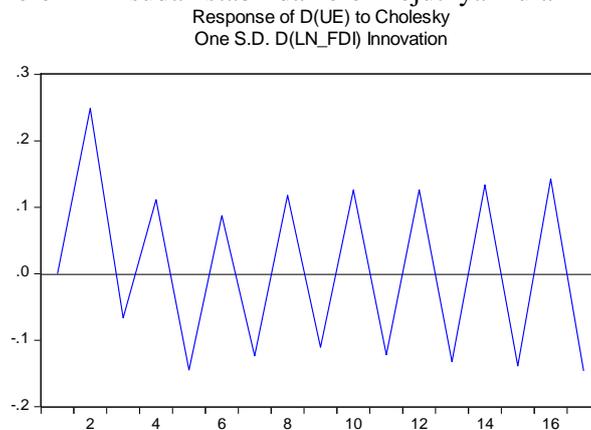
Analisis Impuls dan Dekomposisi Tingkat Pengangguran di Indonesia

Adanya perlakuan inovasi dengan memberikan nilai 1 standar deviasi pada variabel inflasi berdampak pada peningkatan pengangguran sebesar 0,5 pada 2 tahun pertama, selanjutnya respon tingkat pengangguran menurun pada sampai periode ke-6. Efek perlakuan mulai stabil pada 9 tahun berikutnya.

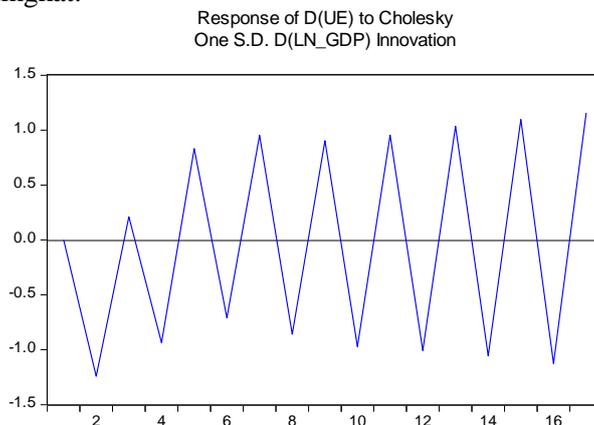


Gambar 1.1 Respon UE terhadap *Shocking Impuls* INF

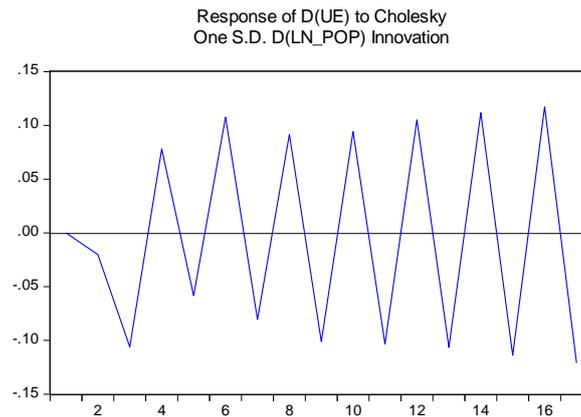
Sementara respons UE terhadap perlakuan pada tingkat FDI menunjukkan guncangan pada tahun pertama hingga kedua, dengan respons kenaikan UE, namun mengalami penurunan pada tahun ketiga. Pada tahun ke-4 pengaruh efek FDI sudah stabil dan efek kejutnya mulai hilang.

Gambar 1.2 Respon UE terhadap *Shocking Impuls* FDI

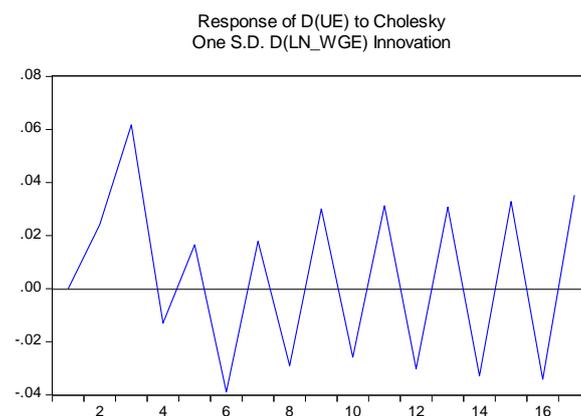
Sebagaimana FDI, efek GDP menunjukkan efek yang pendek. Perlakuan yang dilakukan pada variabel GDP, menunjukkan respons penurunan pada tingkat pengangguran sampai 1.0 standar deviasi. Pada tahun ke-3 hingga tahun ke-17 efek menunjukkan dalam rentang positif dan negatif dengan deviasi yang meningkat.

Gambar 1 Respon UE terhadap *Shocking Impuls* GDP

Respons UE terhadap variabel jumlah penduduk juga menunjukkan guncangan yang tidak signifikan. Meskipun efek perubahan tinggi namun gejala yang ditunjukkan berfluktuatif dan dalam rentang yang sama selama tahun ke-3 hingga tahun ke-17.

Gambar 2 Respon UE terhadap *Shocking Impuls* POP

Efek kenaikan Upah dengan melakukan perlakuan 1 standar deviasi menunjukkan direspons positif tingkat pengangguran walaupun kenaikannya tidak besar yaitu naik hanya 0,06. Efek guncangan hanya sampai pada tahun ke-3 sementara pada tahun ke-4 efek sudah menunjukkan pergerakan fluktuatif yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan oleh perlakuan pada upah tidak terlalu lama pada pengangguran dan bersifat jangka pendek.

Gambar 3 Respon UE terhadap *Shocking Impuls* WGE

Dekomposisi model menunjukkan bahwa pada tahun pertama perubahan dari tingkat pengangguran 100% disebabkan oleh perubahan tingkat pengangguran pada periode pertama. Pada periode kedua, komposisi kontribusi UE menjadi menurun 26,9% sementara faktor kontribusi GDP meningkat dari 0% menjadi 61,3%. Ditahun kedua, peran inflasi meningkat dari 0, menjadi 9% dan terus meningkat menjadi 14% pada tahun ketiga. Di tahun keempat, kontribusi inflasi menurun mejadi 12% dan terus menurun hingga mencapai 5% pada periode kesepuluh. Sementara GDP terus meningkat hingga 75% pada periode ke 10. Kontribusi FDI meningkat pada priode kedua, dan bergerak pada kisaran 2,4% hingga 1,75% antara periode kedua hingga periode kesepuluh. Sementara kontribusi untuk upah dan jumlah penduduk sangat kecil dibawah 1%, selama periode 10 tahun.

Pembahasan

Hasil analisis hubungan kausalitas, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berhubungan secara dinamis dengan tingkat upah minimum regional. Hubungan kausalitas antara

tingkat pengangguran dengan tingkat upah minimum regional maupun sebaliknya antara tingkat upah minimum regional dengan pengangguran menunjukkan hubungan yang sangat nyata dan bermakna. Ini menunjukkan terjadinya guncangan pada tingkat pengangguran baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan akan direspons di periode berikutnya dalam bentuk perubahan tingkat upah minimum regional. Begitu juga terjadinya perubahan tingkat upah dapat memberikan efek pada tingkat pengangguran.

Model koefisien VAR menunjukkan bahwa upah minimum regional pada *lag* tahun pertama menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dengan besaran koefisien mencapai -15,921. Ini berarti kenaikan nilai upah minimum pada tahun pertama akan direspons penurunan angka pengangguran. Namun hasil ini tidak konsisten negatif, karena pada *lag* tahun kedua, koefisien pengaruhnya menunjukkan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan secara terus menerus upah minimum regional dapat berakibat meningkatkan angka pengangguran.

Temuan ini sejalan dengan bukti empiris Panjawa & Soebagiyo (2014) yang meneliti tentang efek peningkatan upah minimum terhadap tingkat pengangguran, dan menemukan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Temuan ini juga sejalan dengan hasil temuan Trimurti & Komalasari (2014) bahwa tingkat upah minimum merupakan determinan utama tingkat pengangguran. Mankiw (2012) fenomena peningkatan upah dengan meningkatnya angka pengangguran sebagai *wage rigidity* (kekakuan upah) yaitu terjadinya ketidakmampuan upah untuk menyesuaikan sampai di titik ekuilibrium. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antarjumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, meningkatnya tingkat upah membuat penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. Penyebab kekakuan upah antara lain: Peraturan upah minimum, serikat pekerja dan efisiensi upah.

Meskipun tidak ditemukan adanya hubungan dinamis antara tingkat pengangguran dengan arus modal asing yang masuk ke Indonesia, temuan penelitian dengan analisa Granger Causality menyimpulkan bahwa FDI terbukti mempunyai pengaruh secara statistik terhadap tingkat pengangguran. Analisis model persamaan VAR menunjukkan bahwa FDI pada *lag* tahun pertama mempunyai pengaruh negatif namun pada tahun kedua menunjukkan hasil sebaliknya.

Temuan beberapa peneliti menunjukkan hasil yang kurang konsisten tentang peranan arus modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada negara tujuan. Pandangan yang menganggap bahwa FDI mempunyai dampak positif seperti Efendi dan Soemantri (2003) menganggap dengan adanya arus investasi asing ke suatu negara, maka memungkinkan penyerapan keahlian dalam bentuk transfer teknologi, keahlian manajerial, pengenalan teknologi yang baru dalam produksi dan kemampuan untuk mengakses jaringan internasional. Sementara argumentasi yang berlawanan seperti Germidis (1977) beralasan bahwa investasi asing langsung dapat mengganggu ekonomi negara tujuan. Walaupun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bukti yang kuat adanya pengaruh negatif antara FDI dengan tingkat pengangguran seperti dalam penelitian Zeb et al. (2014), Trimurti et al. (2015) maupun Sabir & Naz (2015). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa arus investasi asing mempunyai dampak positif bagi perekonomian yaitu berupa penyerapan tenaga kerja. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. *Foreign Direct Investment* (FDI) dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya *capital outflow* sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat ditarik secara tiba-tiba dan menimbulkan kerentanan ekonomi.

Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh terhadap GDP. Uji Granger menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi pendapatan domestik, namun hubungan yang terjadi tidak bersifat dinamis dan hanya berlaku searah. Ini menunjukkan terjadinya perubahan pada tingkat pengangguran memberikan dampak pada pendapatan nasional, sementara model persamaan VAR menunjukkan bahwa GDP pada tahun kedua (*lag* 2) terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Analisa dekomposisi pada respons ketika diberikan perlakuan GDP, menunjukkan bahwa GDP berkontribusi cukup besar yaitu pada kisaran 61% hingga 75% untuk periode kedua hingga kesepuluh. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel merupakan determinan penting bagi tingkat pengangguran di Indonesia.

Simpulan terhadap hubungan antara GDP dengan tingkat pengangguran tersebut konsisten dengan beberapa penelitian yang ada. Mayoritas temuan empiris yang ada (Trimurti & Komalasari, 2014; Eita & Ashipala, 2010; Maqbool et al., 2013; Sabir & Naz, 2015) menunjukkan fungsi penting pendapatan nasional bagi penurunan angka pengangguran.

Gross Domestic Product (GDP) diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw, 2006:5).

Uji Granger menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan dinamis antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Akan tetapi, pengujian menyimpulkan hubungan kausalitas antara tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk. Koefisien VAR menjelaskan bahwa populasi penduduk memberikan efek negatif terhadap tingkat pengangguran, ini berarti bahwa terjadinya peningkatan angka pengangguran di Indonesia dapat memicu penurunan jumlah penduduk.

Flaim (1990) menyatakan bahwa perubahan populasi penduduk berhubungan kuat dengan tingkat pengangguran dalam jangka panjang, hal ini karena perubahan struktur umur penduduk dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai indikator kesehatan pasar tenaga kerja. Arsyad (2010) menyatakan bahwa masalah kependudukan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan antara lain adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diantara variabel determinan tingkat pengangguran di Indonesia, variabel-variabel yang terbukti mempunyai hubungan kausalitas antara lain: FDI terhadap tingkat pengangguran, tingkat pengangguran terhadap GDP, tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk, tingkat pengangguran terhadap tingkat upah minimum regional dan tingkat upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran. Sementara uji terhadap tingkat pengangguran dengan inflasi atau sebaliknya, tingkat pengangguran dengan FDI, GDP dengan tingkat pengangguran, Jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran tidak terbukti mempunyai hubungan kausalitas yang signifikan.

Hasil pengujian hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat upah bersifat dinamis. Besaran tingkat pengangguran dapat menjadi pemicu perubahan tingkat upah minimum ataupun sebaliknya. Secara umum efek guncangan terhadap tingkat pengangguran ketika variabel bebas diberikan *impulse* bersifat jangka pendek yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Analisa dekomposisi menunjukkan bahwa kontribusi utama tingkat pengangguran antara lain GDP, inflasi dan FDI.

Saran

FDI selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini karena investasi belum menjadi prioritas bagi investor asing. Dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, posisi Indonesia masih belum menjadi prioritas tujuan, hal ini karena sistem birokrasi perijinan dianggap masih rumit. Oleh sebab itu perlu dilakukan deberikrasi untuk memangkas waktu perijinan investasi.

Terjadinya kecenderungan peningkatan kenaikan UMR tiap tahunnya, hal ini menjadikan investor dan pengusaha memilih untuk memindahkan usahanya ke negara-negara dengan upah yang lebih murah. Dampaknya adalah peningkatan PHK yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi usaha. Pemerintah perlu bersikap matang dalam menetapkan UMR agar

selain menguntungkan buruh juga tidak membebani pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M.H. & Soesatyo, Y., 2015. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3).
- Boyce, C.J., Wood, A.M., Daly, M. & Sedikides, C., 2015. Personality change following unemployment. *Journal of Applied Psychology*, 100(4), pp.991-1011.
- Cheema, A.R. & Atta, A., 2014. Economic determinant of unemployment in Pakistan: Co-Integration Analysis. *International Journal of Business and Social Science*, 5(3), pp.210-23.
- Darma, R. & Arsyad, M., 2010. Determinant of unemployment in Indonesia: A Study on development program of rural employment in Pinrang District, South Sulawesi. *Ryokoku Journal of Economic Studies*, 50(1), pp.147-59.
- Dickens, R., Machen, S. & Manning, A., 1999. The effect of minimum wages on employment: theory and evidence from Britain. *Journal of Labour Economics*, 17(1).
- Eita, J.H. & Ashipala, J.M., 2010. Determinants of unemployment in Namibia. *International Journal of Business and Management*, 5(10), pp.92-107.
- Jensen, R.J., 1989. The causes and curse of unemployment in the great depression. *Journal of interdisciplinary History*, 19(4), pp.553-83.
- Katz, L.F., 2010. Long-term Unemployment in the Great Recession. *Joint Economic Committee*.
- Lacker, J.M. & Weinberg, J.A., 2007. Inflation and unemployment: A layperson's guide to the phillip curve. *Economic Quarterly*, 93(3), pp.201-27.
- Mankiw, G., 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Medeline, Z., 2000. The effect of minimum wages on employment and hours. *Labor Economics*, pp.729-50.
- Oniore, J.O., Bernard, A.O. & Gyang, E.J., 2015. Macroeconomic determinants of unemployment in Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(10), pp.215-31.
- Panjawa, J.L. & Soebagiyo, D., 2014. Efek peningkatan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), pp.48-54.
- Raphael, S. & Winter, E.R., 2001. Identifying the effect of unemployment on crime. *The Journal of Law and Economics*, 44(1), pp.259-83.
- Ridho, M.F.R., 2010. Pengangguran dan pembangunan perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 21(1), pp.55-68.
- Sabir, G.M. & Naz, S., 2015. Economic determinant of unemployment: empirical result from Pakistan. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(9), pp.150-56.
- Trimurti, C.P. & Komalasari, Y., 2014. Determinant of unemployment: empirical evidence from 7 province in Indonesia. *cientific Research Journal*, II(VIII), pp.5-10.

Trimurti, C.P., Sukarsa, M., Budhi, M.K.S. & Yasa, I.G.W.M., 2015. Determinant and the impact Foreign Investment to economic growth and unemployment in Java-Bali Region. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 6(5), pp.69-74.

Zeb, N., Qiang, F. & Sharif, M.S., 2014. Foreign direct investment and unemployement reduction in Pakistan. *International Journal Economic Resources*, 5(2), pp.10-17.